



# Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Belanja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting* Pemerintah Provinsi di Indonesia

Sri Wahyuni Wulandari <sup>1\*</sup>, Erna Sulistyowati <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi email: [sriwahyuniwulandari0311@gmail.com](mailto:sriwahyuniwulandari0311@gmail.com)

**Abstract.** *Internet financial reporting is crucial to raising public confidence and is one of the ways to maintain clean and good governance. The government has issued regulations on Internet Financial Reporting but has not been fully implemented by the district/city and province governments. Earlier studies indicated that local real income (PAD), government size, and regional spending influenced the implementation of Internet Financial Reporting but the results were inconsistent. The study aims to find out the impact between PAD, government size, and regional spending on the implementation of Internet Financial Reporting. The samples in this study consisted of 33 data obtained using purposive sampling techniques from 38 provinces, with observation time ranges from 2020 – 2022. The analysis of this study uses a double linear regression method using SPSS 22 software. Research results show that PADs and government measurements influence Internet Financial Reporting, but regional spending has no influence over the implementation of Internet financial reporting by the provincial government in Indonesia.*

**Keywords:** *PAD, government size, and regional spending*

**Abstrak.** *Internet Financial Reporting* sangatlah penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjadi salah satu cara untuk mencapai *clean and good governance*. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai *Internet Financial Reporting* tetapi belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Pada penelitian sebelumnya mengindikasikan pendapatan asli daerah (PAD), ukuran pemerintah, dan belanja daerah mempengaruhi pelaksanaan *Internet Financial Reporting* tetapi hasil yang diperoleh belum konsisten. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antara PAD, ukuran pemerintah, dan belanja daerah terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 data yang diperoleh melalui Teknik *purposive sampling* dari 38 provinsi, dengan rentang waktu pengamatan dari tahun 2020 – 2022. Analisis penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*, namun belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* pemerintah provinsi di Indonesia.

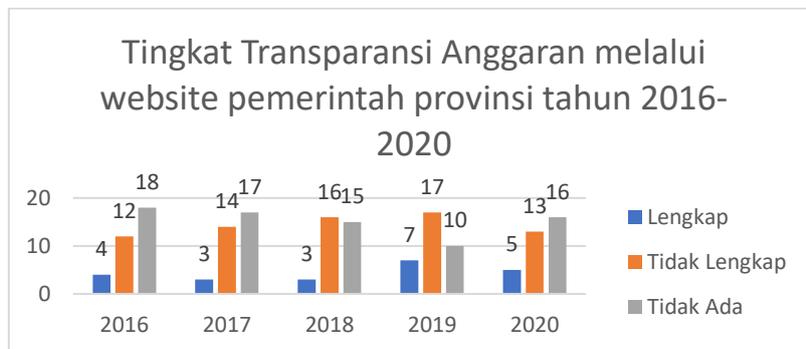
**Kata kunci:** *PAD, Ukuran pemerintah, Belanja pemerintah.*

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan pada bidang teknologi informasi berkembang pesat setiap tahun di seluruh penjuru dunia dengan dibuktikannya penyampaian informasi yang tidak memiliki batasan waktu dan ruang. Data yang dimiliki Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2020 -2022 pengguna internet mengalami kenaikan sejumlah 13,24 juta, sehingga total pengguna internet pada tahun 2022 sejumlah 210 juta pengguna (Finaka, 2024). Dengan kelebihan yang dimiliki internet pemerintah Indonesia memanfaatkan internet sebagai media penyampaian kinerja penyelenggara pemerintah. Pada Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 lembaga pemerintah diwajibkan memiliki situs resmi agar mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah. informasi publik mengenai pengelolaan anggaran juga diperhatikan oleh pemerintah dengan di

buatkannya PP Nomor 56 tahun 2005 yang diperbarui dengan PP Nomor 65 tahun 2010 sebagai pembaharuan dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Diikuti dengan Instruksi Menteri No 188.52/1797/SC/2012 mengenai Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pelaksanaan pelaporan pada website dikenal dengan istilah *Internet Financial Reporting*.

Pada tahun 2022 Indonesia berada pada peringkat kedua dalam hal transparansi pengelolaan anggaran pada lingkup Asia Tenggara dengan kategori *sufficient*, serta nomor 20 dari 120 negara di dunia. Indeks transparansi Indonesia mencapai 70 poin jauh lebih tinggi dibandingkan negara di Asia Tenggara (Open Budget Survey, 2023). Pemerintah pusat telah membuktikan secara nyata tingkat transparansi yang dimiliki sudah baik sedangkan pada pemerintah provinsi dan kabupaten setelah lebih dari sepuluh tahun *Internet Financial Reporting* belum dilaksanakan oleh seluruh pemerintah di tingkat provinsi.



**Gambar 1.** Diagram Tingkat Transparansi Anggaran Pemerintah Provinsi  
*Sumber: Mutmainnah et al., (2023)*

Diagram 1 merupakan hasil pengolahan data mengenai pelaksanaan *Internet Financial Reporting* ditingkat provinsi Indonesia dari tahun 2016 - 2020. Berdasarkan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Internet Financial Reporting* pemerintah provinsi masih rendah, dengan kategori lengkap hanya tujuh provinsi. Tetapi pada kategori tidak lengkap sudah melebihi 50% dari jumlah pemerintah provinsi di Indonesia. serta kategori tidak ada mengalami fluktuasi setiap tahunnya, data ini menunjukkan apabila pemerintah provinsi kurang maksimal untuk melaksanakan peraturan keterbukaan informasi publik dan pelaporan keuangan melalui internet (Mutmainnah et al., 2023).

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Internet Financial Reporting* seperti pada Firly et al (2019) menemukan bahwa PAD dan ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Sementara itu, Iszardani & Pancawati (2021) juga menemukan hubungan positif antar PAD dan IFR, namun ukuran pemerintah justru memiliki pengaruh negatif. Hasil penelitian Azis et

al.,(2020) menunjukkan bahwa hasil belanja daerah dan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh, sementara ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Internet Financial Reporting* di pemerintah daerah masih belum konsisten. Sehingga, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji lebih lanjut apakah pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, dan belanja pemerintah memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* di tingkat provinsi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Keagenan**

Meckling (1967) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara dua pihak di mana satu pihak (agen) bertindak atas nama pihak lain (prinsipal) dimana menurut teori ini memiliki potensi konflik kepentingan. Sebagai lembaga yang bertindak atas nama masyarakat, tanggung jawab pemerintah daerah adalah memberikan laporan kepada masyarakat tentang hasil dari kegiatan pemerintahan yang telah dilaksanakan. Hasil tersebut berkenaan dengan sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat, yang umumnya disampaikan dalam bentuk laporan keuangan (Putra & Efrizal, 2020)

### **Teori sinyal**

Spence (1973) menjelaskan bahwa informasi yang dikirim oleh pemilik informasi merupakan suatu tanda atau sinyal berupa informasi yang bermanfaat bagi pihak penerima yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan. Ada dua macam sinyal yang biasanya diungkapkan: sinyal baik (berita baik) dan sinyal buruk (berita buruk). Sebagai pemerintah, mereka tentunya ingin menunjukkan sinyal baik kepada masyarakat dengan laporan keuangan yang disampaikan dengan baik, meningkatkan sistem pengendalian intern, memberikan pengungkapan yang lebih lengkap, dan memberikan penjelasan yang lebih detail di situs resmi mereka (Mariani & Utami, 2019).

### **Laporan Keuangan pemerintah daerah**

PP Nomor 71 tahun (2010) tentang standar akuntansi pemerintah menyatakan bahwa Laporan keuangan dibuat untuk menunjukkan posisi keuangan dan transaksi entitas selama periode pelaporan. Laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan adalah dua jenis laporan keuangan. Satu set laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas laporan keuangan (CaLK).(Erlina et al., 2020).

### ***Internet Financial Reporting***

*Internet Financial Reporting* adalah cara menyebarkan informasi organisasi baik keuangan maupun non-keuangan, melalui situs website organisasi yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan organisasi dengan para *stakeholder* atau pengguna informasi (Rozak & Sulistyowati, 2022). Pelaksanaan *Internet Financial Reporting* didukung penuh oleh pemerintah dengan dibuatnya peraturan yang mendukung pelaksanaan IFR adapun peraturannya seperti PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 56 tahun (2005) tentang sistem informasi keuangan daerah, PP Nomor 71 Tahun (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tahun (2012) tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran kualitas *Internet Financial Reporting* dilakukan dengan merujuk pada kriteria dan parameter yang telah ditetapkan dalam penelitian terkait (Balqis, 2023) yang disesuaikan dengan instruksi mendagri Nomor 188.52/179/SJ Tahun 2012

$$IFR = \frac{\sum score}{Max(12)}$$

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan utama pemerintah daerah yang berasal dalam wilayahnya sendiri. PAD terdiri dari berbagai jenis penerimaan seperti retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, pajak daerah, dan pendapatan tambahan yang sah menurut peraturan perundang undangan. Pendapatan asli daerah diukur dengan rasio realisasi PAD (Fawziah & Azra, 2020).

$$\text{Rasio pendapatan daerah} = \text{PAD/Pendapatan Daerah}$$

### **Ukuran Pemerintah**

Total aset, jumlah pegawai, dan total pendapatan dapat dijadikan indikator ukuran pemerintah (Jatmiko, 2023). indikator yang dapat mencerminkan dimensi pemerintahan adalah jumlah total aset, karena aset merupakan sumberdaya yang dimiliki pemerintah sebagai akibat dari kejadian masa lalu yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan ekonomi dimasa depan. Pertimbangan total aset sebagai indikator karena total asset dianggap lebih stabil daripada ukuran lain (Narulitasari & Zafira, 2021).

$$\text{Ukuran pemerintah daerah} = \text{LN Total aset}$$

### **Belanja Pemerintah**

Menurut PSAP No. 2 seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengurangi saldo kas umum daerah yang wajib yang ditanggung oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran merupakan definisi dari belanja daerah. Klasifikasi belanja untuk pemerintah

provinsi dan kabupaten dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dibagi menjadi tiga yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga. Belanja juga berperan sebagai alat informasi kepada masyarakat mengenai realisasi pembangunan. Selain itu, belanja juga dapat menjadi sarana untuk mengendalikan dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah (Winangsih & Fathah, 2023). Dalam penelitian ini, belanja daerah diukur dengan realisasi belanja daerah (Priyastiwi & Saputra, 2019). Data belanja daerah adalah data tahun 2020-2022 dalam satuan rupiah.

$$\text{Belanja daerah} = \text{Realisasi Belanja daerah}$$

## **Kerangka pemikiran**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting***

Dengan memiliki kinerja yang baik maka pemerintah akan melakukan pengungkapan dan penyampaian informasi, hal ini sejalan dengan teori sinyal dimana pemerintah akan memberikan sinyal baik (*good news*) atas kinerja yang sudah dijalankan selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dengan melaksanakan *Internet Financial Reporting*. Sehingga semakin tinggi PAD yang dimiliki daerah, semakin besar pula pemerintah daerah untuk membuka laporan keuangan pemerintah daerah melalui situs resmi karena biayanya yang relatif murah, lebih mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dimana saja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban aparat pemerintah.

H1: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting*

### **Pengaruh Ukuran pemerintah Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting***

Pemerintahan daerah dengan ukuran besar biasanya memiliki jumlah aset yang cukup signifikan. Oleh karena itu semakin banyak pihak yang akan memberikan perhatian yang lebih intensif, dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan asetnya (Sherly, 2020). Pemerintah yang memiliki jumlah aset yang besar perlu bertanggung jawab atas pengelolaan asetnya kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya ketidak seimbangan informasi hal ini sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah daerah memberikan laporan kepada masyarakat tentang hasil dari kegiatan pemerintahan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab.

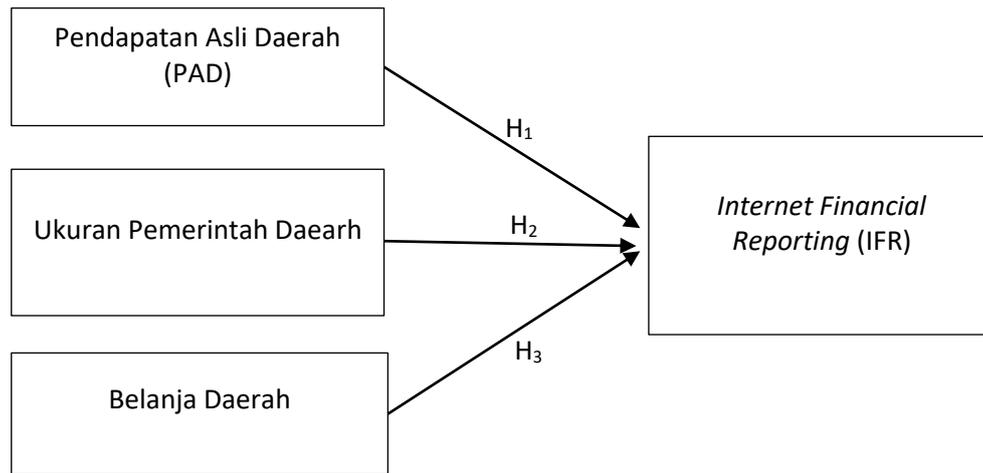
H2: Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting*

### **Pengaruh Belanja pemerintah Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting***

Belanja daerah menjadi pendorong utama bagi pemerintah dalam mengungkapkan laporan keuangan melalui internet. Semakin tinggi besarnya belanja daerah menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah terhadap masyarakat telah baik, dan fasilitas yang berkualitas dapat dimanfaatkan secara optimal (Putri & Setiawan, 2022). Belanja daerah seharusnya

diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui peningkatan layanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas umum, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi tingkat layanan yang disediakan maka akan diikuti dengan penyampaian informasi mengenai layanan tersebut melalui situs webnya (Mutih, 2020).

H3: Belanja pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting*



**Gambar 2.** Kerangka Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, ukuran daerah, belanja daerah, terhadap *Internet Financial Reporting*. Adapun subjek dari penelitian ini adalah informasi anggaran yang terdapat pada situs resmi pada pemerintah tingkat provinsi di seluruh Indonesia yang melaksanakan pada tahun 2020-2022. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 data yang diperoleh melalui Teknik *purposive sampling* dari 38 provinsi, dengan rentang waktu pengamatan dari tahun 2020 – 2022.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari masing masing situs resmi pemerintah provinsi. Data yang tekumpul akan di analisis dengan software SPSS menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda. Proses yang pengujian meliputi uji noemalitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis, yang terdiri dari uji koefisien regresi determinasi, uji f, dan uji t

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitaas

**Tabel 1.** Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	16.30847576
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.054
	Negative	-.093
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

*Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS*

Analisis uji normalitas menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai signifikansi sebesar 0,20, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05.

### Uji Asumsi klasik

#### 1. Uji Multikolinearitas

**Tabel 2.** Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.563	1.775
X2	.132	7.561
X3	.136	7.355

*Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS*

Analisis multikolinearitas semua variabel independen (PAD, Aset, dan Belanja) memenuhi persyaratan nilai  $tolerance > 0.1$  dan  $VIF < 10$ . Hasil ini mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi, sehingga memungkinkan interpretasi koefisien regresi secara individu.

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	66.812	65.918		1.014	.319
X1	-8.874	8.657	-.216	-1.025	.314
X2	-1.739	2.234	-.338	-.779	.442
X3	-7.569E-15	.000	-.020	-.047	.963

a. Dependent Variable: ABSRES

*Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS*

Dari data taeb1 3, uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,314 pada PAD, sedangkan untuk asset memiliki nilai 0,442, dan variable terakhi memiliki nilai 0,963 untuk belanja. Karena semua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (tidak ada heteroskedastisitas) tidak dapat ditolak.

### 3. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.** Hasil Runs test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-1.34858
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	17
Total Cases	33
Number of Runs	15
Z	-.703
Asymp. Sig. (2-tailed)	.482

a. Median

*Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS*

Uji Runs test menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,482. Hasil ini memiliki nilai melebihi taraf signifikansi yaitu 0,05, maka hipotesis nol (tidak ada autokorelasi) gagal ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa t autokorelasi tidak terjadi pada data penelitian ini.

### Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 5.** Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B			
1 (Constant)	666.447		4.846	.000
X1	49.366		2.733	.011
X2	-20.368		-4.371	.000
X3	5.691E-13		1.690	.102

a. Dependent Variable: Y1

*Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS*

Persamaan regresi yang dihasilkan dari tabel **XX** adalah sebagai berikut:

$$Y = 666,447 + 49,366X_1 - 20,368X_2 + 5.691E-13X_3 + \epsilon$$

Berikut adalah hasil penjelasan dari tabel atas persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 666,447 yang berarti apabila variabel bebas dianggap konstan atau mempunyai nilai 0, berarti jumlah *Internet Financial Reporting* (Y) diprediksi sebesar 666,447

- b. Nilai koefisien untuk Pendapatan asli daerah (X1) sebesar 49,366. Hal ini menunjukkan bahwa nilai (X1) positif jika variabel Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan berarti *Internet Financial Reporting* akan mengalami kenaikan sebesar 49,366.
- c. Nilai koefisien ukuran pemerintah (X2) adalah -20,368 yang berarti setiap peningkatan ukuran pemerintah (X2) sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan Pelaksanaan *Internet Financial Reporting* sebesar 20,368 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
- d. Nilai koefisien belanja daerah (X3) sebesar 5.691E-13 Hal ini menunjukkan bahwa nilai (X2) positif yang berarti adanya pengaruh positif dari belanja daerah (X1) berarti apabila belanja daerah mengalami kenaikan berarti *Internet Financial Reporting* akan mengalami kenaikan sebesar 5.691E-13.

### Uji Koefisien determinasi

**Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.764 <sup>a</sup>	.583	.540	11.71330	1.236

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS

Koefisien determinasi adjusted (adjusted R-squared) sebesar 0,540 menunjukkan model regresi yang digunakan mampu menjelaskan 54% varians variabel dependen. Dengan kata lain, variabel independen yang dimasukkan dalam model berkontribusi sebesar 54% dalam menjelaskan variasi *Internet Financial Reporting*. Sisanya, 46% dari varians variabel dependen, dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model atau faktor pengganggu lainnya

### Uji F

**Tabel 7. Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5566.664	3	1855.555	13.524	.000 <sup>b</sup>
Residual	3978.839	29	137.201		
Total	9545.503	32			

b. Dependent Variable: Y1

c. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS

Berdasarkan tabel 7 diperoleh hasil F hitung 13,524 dan nilai Sig. 0.00, sedangkan untuk F tabel adalah 2,93. Dari perolehan ini dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel yaitu 13,524 > 2,93 dan nilai Sig. 0,00 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

pendapatan asli daerah (PAD), ukuran pemerintah, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

**Uji t**

**Tabel 8.** Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	666.447	137.523		4.846	.000
X1	49.366	18.060	.437	2.733	.011
X2	-20.368	4.660	-1.441	-4.371	.000
X3	5.691E-13	.000	.550	1.690	.102

*Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS*

Dari uji t memperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pada variabel Pendapatan asli Daerah (PAD) (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,733 (lebih besar dari 1,699), Untuk nilai signifikansi  $0,011 < 0,05$  berarti PAD Dari kedua hasil tersebut menandakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (Y) maka hipotesis pertama (H1) diterima.
- b. Pada variabel ukuran daerah (X2) memiliki nilai t hitung sebesar  $-4,371 < -1,699$ . Nilai signifikansi yang diperoleh  $0,000 < 0,05$  hasil ini menunjukkan ukuran pemerintah berpengaruh signifikan negatif maka hipotesis kedua (H2) diterima.
- c. Pada variabel belanja daerah (X3) memiliki nilai t hitung sebesar  $1,690 < 1,699$  sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,102. Maka belanja daerah (X3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* (Y) maka hipotesis ketiga (H3) ditolak.

**5. PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting***

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kurniawati (2020), Fawziah & Azra (2020), Firly et al., (2019). Pemerintah daerah dengan PAD yang tinggi memiliki keinginan yang tinggi pula untuk menyampaikan laporan keuangan, hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu indikator kinerja yang baik dari pemerintah daerah. Penyampaian melalui situs resmi dipilih karena biayanya yang relatif murah, lebih mudah

diakses oleh siapa saja, kapan saja, dimana saja serta sebagai bentuk pertanggungjawaban aparat pemerintah.

### **Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting***

Ukuran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menguatkan temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Gustiara & Pancawati (2021) dan Putra & Efrizal (2020). Alasan lain mengenai hubungan negatif antara aset dengan *Internet Financial Reporting* adalah tersebarnya aset yang dimiliki pemerintah provinsi sehingga melibatkan banyak unit kerja dan dinas terkait dalam pengelolaan aset yang dimiliki. Jika pemerintah provinsi dan unit kerja kurang dalam koordinasi dan komunikasi maka dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

### **Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan *Internet Financial Reporting***

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, belanja daerah tidak mempengaruhi pelaksanaan *Internet Financial Reporting* pemerintah provinsi di Indonesia secara parsial. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Auffadiina & Suhartini (2023), Azis et al., (2020). Hal ini dapat terjadi dikarenakan belanja daerah tidak hanya difokuskan pada peningkatan penyampaian pelaporan keuangan saja, tetapi belanja daerah juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti fasilitas umum, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih diperlukan oleh masyarakat sehingga pemerintah provinsi lebih fokus pada penyampaian informasi yang lebih umum dibandingkan dengan menyampaikan informasi keuangan.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari analisis yang telah dilaksanakan memperoleh kesimpulan bahwa H1 dan H2 diterima dimana pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting*. ukuran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting*, sedangkan H3 di tolak karena dari hasil pengukuran belanja daerah tidak memiliki pengaruh dimana memiliki nilai Sig > 0,05 yaitu 0,102.

### **Saran**

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan sehubungan penelitian yang telah dilaksanakan:

- a. Pemerintah disarankan untuk membuat tampilan website yang mudah dipahami oleh masyarakat untuk mencari informasi laporan keuangan.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya seperti anggaran untuk teknologi, tingkat pengguna internet, opini audit dan tingkat investasi.
- c. Mengembangkan pengukuran terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Auffadiina, J., & Suhartini, D. (2023). What are the determinants of disclosure of financial statements of the gerbangkertasusila national strategic area via the internet? *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 2192–2207.
- Azis, I., Hapsari, D. W., & Si, M. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Terhadap Internet financial reporting ( Studi Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018 ). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3262–3269.
- Balqis, G. A. R. (2023). *Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financialreporting (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Sultan Agung.
- Erlina, Rambe, omar S., & Rasidianto. (2020). *Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual*. Salemba empat.
- Fawziah, I. N., & Azra, F. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2200–2213. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.207>
- Finaka, A. W. (2024). *221 Juta Penduduk Indonesia Makin Melek sama Internet*. Indonesia Baik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/221-juta-penduduk-indonesia-makin-melek-sama-internet#:~:text=Pengguna Internet Tahun ke Tahun,orang pada periode 2022-2023.>
- Firly, A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017). *E-Jra*, 8(7), 53–63.
- Indonesia, P. R. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah* (56). bpk ri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49722>
- Iszardani, C. G., & Pancawati, H. (2021). The Effect of Regional Income , Leverage , Regional Property on Internet Financial Reporting Disclosure. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 19(1), 30–47.
- Jatmiko, N. L. S. (2023). *Pengaruh ukuran pemerintah, pendapatan per kapita,*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kementrian Dalam Negeri. (2012). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor*

188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

- Kurniawati, D., Sarwono, A. E., & Sunarti. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 237–248. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4432>
- Mariani, E., & Utami, W. (2019). The Effects of Local Government Size , Income per Capita , Local Government Wealth and Audit Opinion on the Quality of Internet Financial Reporting Disclosure : Studies in Indonesia. *Scholars Middle East Publishers*, 9771, 611–619. <https://doi.org/10.36348/sb.2019.v05i11.002>
- Meckling. (1967). *teori keagenan*.
- Mutmainnah, S., Nor, W., Rahardian, M., & Helmina, A. (2023). *Determinan tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia*. 5. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art22>
- Open Budget Survey. (2023). *Open Budget Survey 2023*. <https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2023/indonesia>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *PP Nomor 71 Tahun tentang Standar Akuntansi pemerintah (71)*.
- Putra, A. A. A., & Efrizal, S. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Per Kapita Dan Leverage Terhadap Keteraksesan Internet Financial Report Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(1), 2020–2034.
- Rozak, I., & Sulistyowati, E. (2022). Studi Komparasi Internet Financial Reporting (IFR) Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dan Provinsi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 245–260. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3267>
- Winangsih, A., & Fathah, R. N. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3299–3309.